



KATALOG: 4601013.65

RINGKASAN **EKSEKUTIF**

INDEKS
DEMOKRASI
INDONESIA

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2020

<https://kaltara.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**





RINGKASAN
EKSEKUTIF

INDEKS
DEMOKRASI
INDONESIA

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2020



**Ringkasan Eksekutif
Indeks Demokrasi Indonesia
Provinsi Kalimantan Utara 2020**

ISBN : 978-623-7914-73-0 (PDF)
Nomor Publikasi : 65000.2147
Katalog : 4601013.65
Ukuran Buku : 14.8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : xii + 31 Halaman

Naskah :
BPS Provinsi Kalimantan Utara

Penyunting :
BPS Provinsi Kalimantan Utara

Desain Sampul :
BPS Provinsi Kalimantan Utara

Diterbitkan oleh :
© BPS Provinsi Kalimantan Utara

Dicetak oleh :
Badan Pusat Statistik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN BUKU

Ringkasan Eksekutif Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Utara 2020

Penanggung Jawab :
Tina Wahyufitri, S.Si., M.Si

Koordinator Teknis :
Basran, SE

Penyusun :
Fitri Puspitasari, SST

Editor :
Chairunnisa Julfadlina, SST

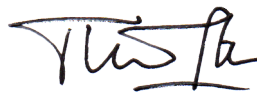
KATA PENGANTAR

Tingginya komitmen pemerintah dalam membangun demokrasi dan politik Indonesia harus didukung oleh data empirik yang dapat dijadikan sebagai landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Bahkan saat ini Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan salah satu indikator di dalam *Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030*.

Publikasi ini menyajikan berbagai indikator penyusun IDI di Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu disajikan pula penjelasan teknis dan teori yang berkaitan dengan IDI Provinsi Kalimantan Utara.

Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan IDI di Provinsi Kalimantan Utara sehingga ringkasan eksekutif ini dapat disusun. Semoga ringkasan eksekutif ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tanjung Selor, September 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Utara



Tina Wahyufitri, S.Si., M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Pendahuluan	1
Penjelasan Teknis	7
Perkembangan Demokrasi Provinsi Kalimantan Utara	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Aspek, Variabel, dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia	14
Tabel 2. Perkembangan Skor Indikator IDI di Provinsi Kalimantan Utara, 2019-2020	26

<https://kaltara.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Perkembangan IDI Provinsi Kalimantan Utara	20
Gambar 2.	Perkembangan Aspek IDI Provinsi Kalimantan Utara, 2015-2020	21
Gambar 3.	Perkembangan Indeks Variabel IDI Kalimantan Utara, 2019 - 2020	33



<http://jktara.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi berdasarkan beberapa aspek tertentu dari demokrasi. Aspek demokrasi dalam penyusunan IDI adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*), Hak-hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Democratic Institution*). Ketiga aspek demokrasi ini kemudian dijabarkan menjadi sejumlah variabel dan indikator.

IDI bertujuan untuk mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia. Berdasarkan indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi di setiap provinsi sesuai dengan ketiga aspek yang dipelajari. Di samping itu, indeks perkembangan demokrasi di satu daerah juga dapat dibandingkan dengan daerah lainnya untuk memperoleh gambaran perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia.

Mengukur perkembangan demokrasi bukanlah pekerjaan yang mudah karena luasnya pengertian demokrasi yang mencakup sejumlah besar objek. Oleh karena itu perlu dilakukan penentuan komponen-

BAB I. PENDAHULUAN

komponen demokrasi apa saja yang datanya akan dikumpulkan sehingga komponen yang lain tidak diperhatikan. Dalam rangka menyusun IDI ditetapkan tiga aspek seperti yang telah disebutkan di atas dengan 11 variabel dan 28 indikator.

Data yang dikumpulkan untuk perhitungan IDI adalah data-data pada tingkat provinsi, maka IDI yang disusun ini adalah IDI pada tingkat provinsi, bukan pada tingkat nasional. Oleh karena itu kata “Indonesia” dalam IDI mengacu pada kumpulan semua provinsi di Indonesia. Tentu saja perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi berbeda dari perkembangan demokrasi pada tingkat nasional. IDI pada tingkat nasional harus menggunakan pemerintah pusat di Jakarta dan rakyat Indonesia secara keseluruhan sebagai sumber data, sedangkan IDI yang disusun pada tahap ini menggunakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut serta rakyat di provinsi bersangkutan sebagai sumber data.

TUJUAN

IDI disusun dengan tujuan:

1. Mengukur secara kuantitatif tingkat pelaksanaan demokrasi karena selama ini perkembangan demokrasi hanya diukur secara kualitatif berdasarkan perkiraan yang bersifat subjektif tanpa tolak ukur yang jelas.
2. Mengukur perkembangan demokrasi.

3. Memperoleh gambaran, tingkat, dan perkembangan demokrasi

MANFAAT

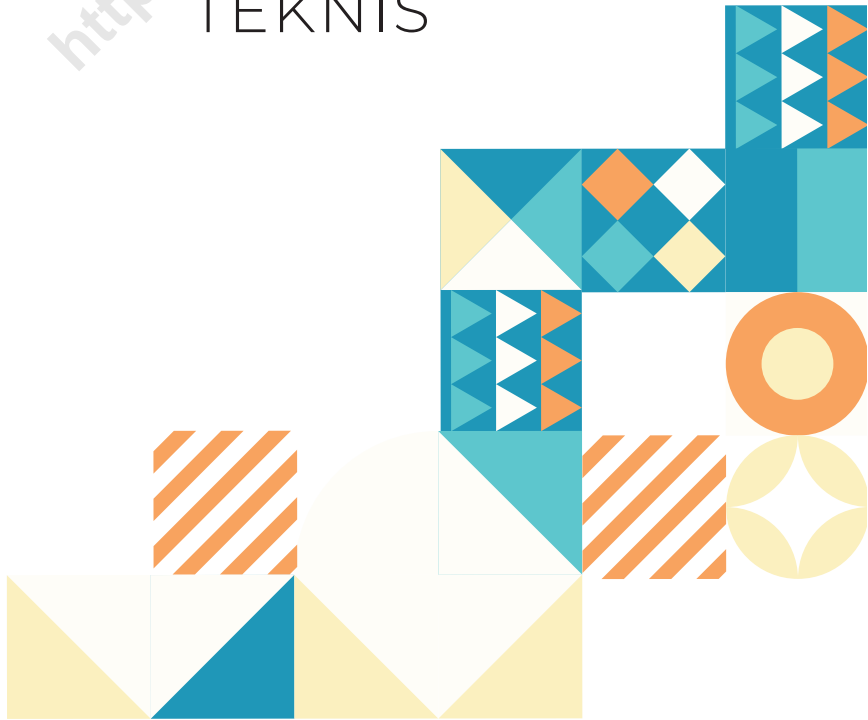
1. Dapat menunjukkan tingkat dan perkembangan demokrasi di tingkat provinsi.
2. Membantu perencanaan pembangunan di bidang politik pada tingkat provinsi. Data IDI mampu menunjukkan aspek, variabel atau indikator yang tidak/kurang berkembang sebagai penghambat tumbuh kembangnya nilai-nilai demokrasi sehingga perlu mendapat perhatian dan prioritas oleh pemerintah pusat secara umum dan pemerintah daerah secara khusus
3. Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah konkrit berdasar kajian ilmiah untuk memperbaiki kinerja provinsi masing-masing dimasa mendatang



<http://kataloga.bps.go.id>

BAB II

PENJELASAN TEKNIS



PENJELASAN TEKNIS

METODE PENGUMPULAN DATA

Data IDI dikumpulkan dengan menggunakan dua metode pendekatan, kuantitatif dan kualitatif. Secara keseluruhan terdapat tiga tahapan pengumpulan data IDI, yaitu:

1. Review surat kabar dan review dokumen

Media yang dimaksud adalah surat kabar, dan untuk itu dipilih salah satu surat kabar dengan oplah terbesar di Provinsi Kalimantan Utara, yang merupakan surat kabar lokal yaitu Radar Tarakan.

Jenis dokumen yang digunakan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara, seperti Surat Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Surat Edaran, Surat Keputusan DPRD dan dokumen-dokumen lainnya (data pemilih, data pelanggaran Pemilu dan sebagainya).

2. Focus Group Discussion (FGD) IDI

FGD mempunyai peranan penting dalam upaya meminimalkan bias dari informasi yang dijaring oleh review media dan review dokumen. Tujuan FGD selain untuk menjaring data kualitatif berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI, juga dimaksudkan untuk (1) mendapatkan informasi titipan (verifikasi, konfirmasi,

diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif berkaitan dengan indikator IDI yang telah dikumpulkan melalui review media dan dokumen, (2) melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi terhadap indikator IDI, (3) menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui review media dan review dokumen.

3. Wawancara Mendalam (WM) IDI

Dilakukan untuk menjangkau fakta/kejadian yang mungkin masih terlewat, atau sudah tertangkap namun kurang lengkap deskripsi dan fakta pendukungnya, karena tidak memungkinkan dieksplorasi secara detail dalam forum FGD. Narasumber WM adalah orang-orang terpilih yang memang banyak mengetahui fakta tertentu yang terkait indikator IDI.

KONSEP DAN DEFINISI

Dalam menyusun IDI terdapat tiga aspek yang dijadikan sebagai objek kajian, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kelembagaan demokrasi. Aspek pertama dan kedua merefleksikan esensi konsep demokrasi. Namun, kedua aspek tersebut tidak mungkin dapat bekerja secara maksimal tanpa adanya aspek kelembagaan demokrasi. Dengan demikian, secara keseluruhan, komponen yang membentuk IDI 2019 terdiri atas 3 Aspek, 11 Variabel dan 28 Indikator.

Aspek Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*)

- 1) **Kebebasan Berkumpul dan Berserikat.**
Berkumpul adalah aktivitas kemasyarakatan dalam bentuk pertemuan yang melibatkan lebih dari 2 orang. Sedangkan berserikat adalah mendirikan atau membentuk organisasi, baik terdaftar atau tidak terdaftar di lembaga pemerintah.
- 2) **Kebebasan Berpendapat;** yakni kebebasan individu dan kelompok untuk mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, dan perasaan, tanpa adanya rintangan berupa tekanan fisik, psikis dan pembatasan.
- 3) **Kebebasan Berkeyakinan;** yakni kebebasan individu untuk meyakini kepercayaan atau agama di luar kepercayaan atau agama yang ditetapkan pemerintah, serta tidak adanya tindakan represi dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain yang menolak kebijakan pemerintah terkait dengan salah satu keyakinan.
- 4) **Kebebasan dari Diskriminasi;** yakni kebebasan dari perlakuan yang membedakan individu warga negara dalam hak dan kewajiban yang dia miliki dimana perbedaan tersebut didasarkan pada alasan gender, agama, afiliasi politik, suku/ras, umur, ODHA, dan hambatan fisik.

Sementara pada tingkat indikator, terdapat 10

(sepuluh) indikator dalam aspek Kebebasan Sipil ini, yang terdiri dari 2 (dua) indikator pada variabel 1 dan 2, serta masing- masing 3 (tiga) indikator pada variabel 3 dan 4.

Aspek Hak-Hak Politik (*Political Rights*)

- 1) **Hak Memilih dan Dipilih;** yaitu hak setiap individu untuk secara bebas memberikan suara dalam pemilihan pejabat publik. Sedangkan hak dipilih adalah hak setiap individu untuk berkompetisi memperebutkan suara secara bebas dalam suatu pemilihan sebagai pejabat publik.
- 2) **Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan.** Secara harfiah partisipasi berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik.

Sementara pada tingkat indikator, Aspek Hak-Hak Politik memiliki tujuh indikator yang terdiri dari: lima indikator pada variabel 1, dan dua indikator pada variabel 2.

Aspek Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*)

- 1) **Pemilihan Umum (Pemilu) yang Bebas dan Adil;** adalah Pemilu yang memenuhi standar demokratis, yang dicerminkan oleh, antara lain: adanya kesempatan yang sama dalam kampanye, tidak adanya manipulasi dalam penghitungan suara, tidak adanya intimidasi dan kekerasan fisik

dalam memberikan suara.

- 2) **Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);** adalah efektivitas pelaksanaan fungsi parlemen/DPRD dalam rangka konsolidasi demokrasi.
- 3) **Peran Partai Politik.** Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.
- 4) **Peran Birokrasi Pemerintahan Daerah.** Dalam hal ini dibatasi pada peran birokrasi dalam konsolidasi demokrasi, yaitu: keterbukaan dan kesungguhan pemerintah daerah dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan keterbukaan (transparansi) dalam penentuan pejabat birokrasi.
- 5) **Peradilan yang Independen (*independent judiciary*)** adalah pelaksanaan *rule of law* yang bebas intervensi, penegakan hukum (*law enforcement*) yang konsisten dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Pada tingkat indikator, aspek Lembaga Demokrasi diturunkan ke dalam sebelas indikator, dengan rincian dua indikator pada masing-masing variabel.

Tabel 1. Aspek, Variabel, dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia

INDIKATOR	
A.	KEBEBASAN SIPIL (<i>CIVIL LIBERTIES</i>)
I.	Kebebasan berkumpul dan berserikat
1.	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
2.	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
II.	Kebebasan berpendapat
3.	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
4.	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
III.	Kebebasan berkeyakinan
5.	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya
6.	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya
7.	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama
IV.	Kebebasan dari diskriminasi
8.	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya

INDIKATOR
9. Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
10. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
B. HAK-HAK POLITIK (<i>POLITICAL RIGHTS</i>)
V. Hak memilih dan dipilih
11. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat
12. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih
13. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)
14. Persentase penduduk yang menggunakan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih
15. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD
VI. Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan
16. Persentase demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan terhadap total demonstrasi/mogok
17. Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
C. LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (<i>INSTITUTIONS OF DEMOCRACY</i>)
VII. Pemilu yang bebas dan adil
18. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu

INDIKATOR
19. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara
VIII. Peran DPRD
20. Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan per kapita
21. Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan
22. Rekomendasi DPRD kepada eksekutif
IX. Peran partai politik
23. Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu
24. Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi
X. Peran birokrasi pemerintah daerah
25. Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
26. Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
XI. Peran peradilan yang independen
27. Keputusan hakim yang kontroversial
28. Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi



<http://litbangbps.go.id>

BAB III

PERKEMBANGAN DEMOKRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA



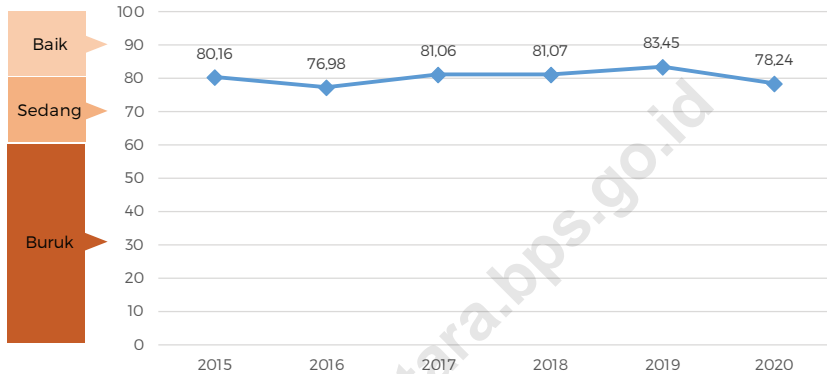
PERKEMBANGAN DEMOKRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

IDI di Kalimantan Utara mulai dihitung terpisah dari Kalimantan Timur sejak tahun 2015. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2020 nilai IDI di Kalimantan Utara berfluktuasi pada awalnya, namun cenderung meningkat. IDI Kalimantan Utara rata-rata berada dalam kategori baik, kecuali pada tahun 2016 dan 2020 berkategori sedang. Capaian IDI Kalimantan Utara pada tahun 2019 merupakan yang paling tinggi selama 4 tahun terakhir. IDI sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik turunnya kondisi demokrasi. Karena IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Berdasarkan Gambar 1, nilai IDI Kalimantan utara pada 3 tahun 2017-2019, terjadi peningkatan. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 81,06 poin, meningkat sebesar 4,08 poin dibandingkan dengan tahun 2016. Kemudian pada tahun 2018, kembali mengalami peningkatan menjadi 81,07 poin, meningkat sebesar 0,01 poin dibandingkan tahun 2017. Dan pada tahun 2019 kembali meningkat sebesar 2,38 poin menjadi 83,45 poin. Namun pada 2020 mengalami penurunan 5,21 poin menjadi 78,24. Adapun tren perkembangan nilai IDI di

Kalimantan Utara selama kurun waktu 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Perkembangan IDI Provinsi Kalimantan Utara 2015-2020

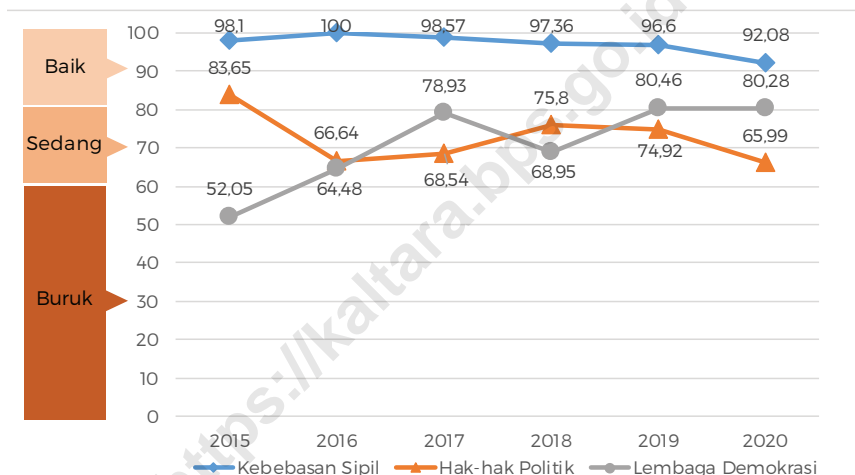


Setelah mengalami nilai tertinggi di tahun 2019, pada tahun 2020 Indeks Demokrasi Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan. Hal ini disebabkan ketiga aspek mengalami penurunan. Aspek Hak-Hak Politik mengalami penurunan terbesar yaitu sebesar 8,93, diikuti Kebebasan Sipil mengalami penurunan sebesar 4,52 dan Lembaga Demokrasi mengalami penurunan sebesar 0,18.

Sejak tahun 2016, aspek IDI Kalimantan Utara tidak ada yang berkategori “buruk”. Aspek hak-hak politik berkategori “sedang”, sementara aspek kebebasan sipil tetap pada kategori “baik” dan aspek lembaga demokrasi berubah dari berkategori “sedang” menjadi “baik”. Aspek hak-hak politik menurun dari tahun 2019 dan 2020. Disamping itu aspek kebebasan sipil menurun sejak 3 tahun terakhir. Kemudian,

aspek lembaga demokrasi cenderung berfluktuasi selama 2016 hingga 2020. Capaian Indeks Demokrasi Kalimantan Utara menurut aspek pembentuknya selama tahun 2015-2020 dapat dilihat di Gambar 2.

Gambar 2. Perkembangan Aspek IDI Provinsi Kalimantan Utara, 2015-2020

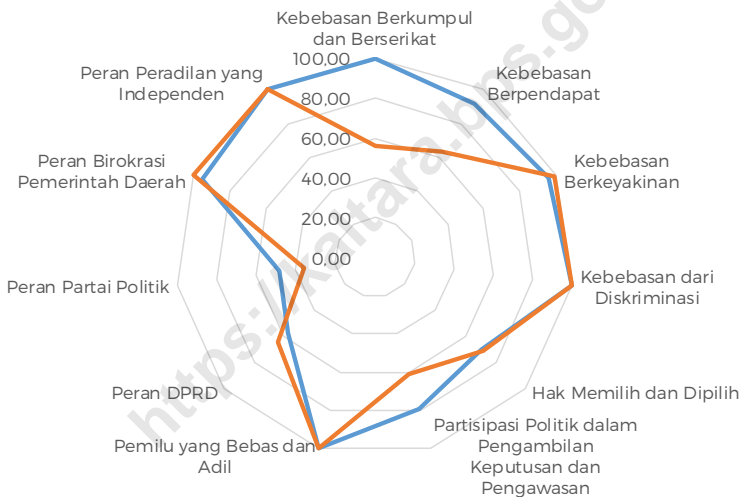


Pada tahun 2020, beberapa variabel mengalami penurunan yang signifikan. Empat dari sebelas variabel mengalami penurunan, empat variabel lainnya mengalami kenaikan, dan tiga variabel tetap.

Variabel yang mengalami penurunan tertinggi adalah Kebebasan Berkumpul dan Berserikat yang turun sebesar 43,75 poin, diikuti dengan Kebebasan Berpendapat menurun sebesar 28,47 poin, kemudian Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan sebesar 18,78 poin, dan Peran Partai Politik menurun sebesar

12,86 poin. Sedangkan variabel yang mengalami kenaikan adalah Kebebasan Berkeyakinan yang naik sebesar 3,08 poin, Hak Memilih dan dipilih yang naik sebesar 0,91 poin, Peran DPRD naik 6,42 poin dan Peran Birokrasi Pemerintah Daerah naik sebesar 4,81 poin.

Gambar 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Kalimantan Utara, 2019-2020



Pada IDI Kalimantan Utara 2020, dari 28 indikator terdapat 17 yang mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80), meliputi:

- a. Indikator 2, Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat,
- b. Indikator 5, Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam

menjalankan agamanya,

- c. Indikator 6, Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Membatasi Kebebasan Menjalankan Ibadah Agama,
- d. Indikator 7, Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama,
- e. Indikator 8, Aturan Tertulis yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok,
- f. Indikator 9, Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok,
- g. Indikator 10, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat Karena Alasan Gender, Etnis, dan Kelompok,
- h. Indikator 11, Hak Memilih atau Dipilih Terhambat,
- i. Indikator 12, Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih
- j. Indikator 18, Keberpihakan KPUD dalam Penyelenggaraan Pemilu,
- k. Indikator 19, Kecurangan dalam Penghitungan

Suara,

- l. Indikator 20, Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD
- m. Indikator 24, Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik,
- n. Indikator 25, Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN,
- o. Indikator 26, Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah,
- p. Indikator 27, Keputusan hakim yang kontroversial, dan
- q. Indikator 28, Penghentian Penyidikan yang Kontroversial oleh Jaksa atau Polisi.

Sebanyak tujuh indikator masih berkategori “buruk” (skor di bawah 60) di tahun 2020. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah:

- a. Indikator 1, Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat,
- b. Indikator 4, Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat,
- c. Indikator 15, Persentase anggota perempuan DPRD

Provinsi,

- d. Indikator 16, Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan,
- e. Indikator 21, Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan
- f. Indikator 22, Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif, dan
- g. Indikator 23, Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu

Indikator-indikator tersebut di atas memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik.

Tabel 2. Perkembangan Skor Indikator IDI di Provinsi Kalimantan Utara, 2019-2020

No	ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR	2019	2020	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA KALIMANTAN UTARA	83,45	78,24	-5,21
A.	KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES)	96,60	92,08	-4,52
I.	Kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	56,25	-43,75
1	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	50,00	-50,00
2	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00	-
II.	Kebebasan berpendapat	91,65	63,18	-28,47
3	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	100,00	70,83	-29,17
4	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	50,00	25,00	-25,00
III.	Kebebasan berkeyakinan	95,51	98,59	3,08

No	ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR	2019	2020	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya	95,65	100,00	4,35
6	Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya	87,50	87,50	-
7	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	100,00	100,00	-
IV.	Kebebasan dari diskriminasi	100,00	100,00	-
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00	-
9	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00	-
10	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00	-
B.	HAK-HAK POLITIK (POLITICAL RIGHTS)	74,92	65,99	-8,93
V.	Hak memilih dan dipilih	70,50	71,41	0,91

No	ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR	2019	2020	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	96,79	96,79	-
12	Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih	96,34	96,34	-
13	Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)	60,68	60,68	-
14	Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (<i>voters turnout</i>)	79,30	79,30	-
15	Perempuan terpilih di DPRD provinsi	38,10	47,63	9,53
VI.	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	79,35	60,57	-18,78
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	58,70	54,35	-4,35
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100,00	66,79	-33,21
C.	LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOCRATIC INSTITUTIONS)	80,46	80,28	-0,18
VII.	Pemilu yang bebas dan adil	100,00	100,00	-

No	ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR	2019	2020	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18	Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu	100,00	100,00	-
19	Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	100,00	100,00	-
VIII.	Peran DPRD	57,79	64,21	6,42
20	Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD	68,90	82,90	14,00
21	Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD	66,66	57,14	-9,52
22	Rekomendasi DPRD kepada eksekutif	10,71	3,57	-7,14
IX.	Peran Partai politik	48,57	35,71	-12,86
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	42,86	28,57	-14,29
24	Perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi	100,00	100,00	-
X.	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	95,19	100,00	4,81
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	89,47	100,00	10,53
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	100,00	100,00	-
XI.	Peran Peradilan yang independen	100,00	100,00	-

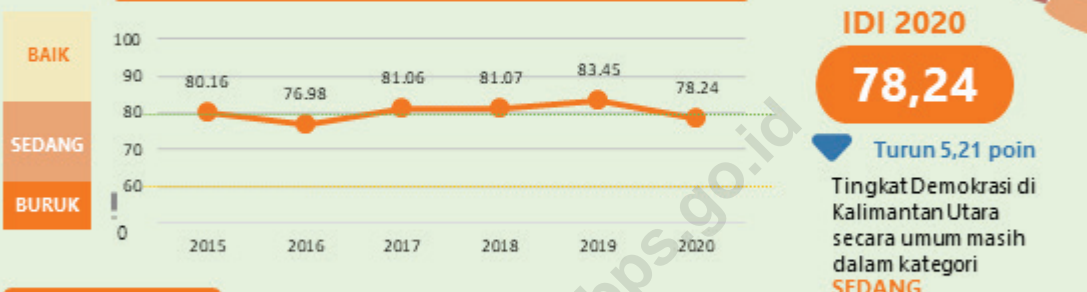
BAB III. PERKEMBANGAN DEMOKRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

No	ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR	2019	2020	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27	Keputusan hakim yang kontroversial	100,00	100,00	-
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00	100,00	-

<https://kaltara.bps.go.id>

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

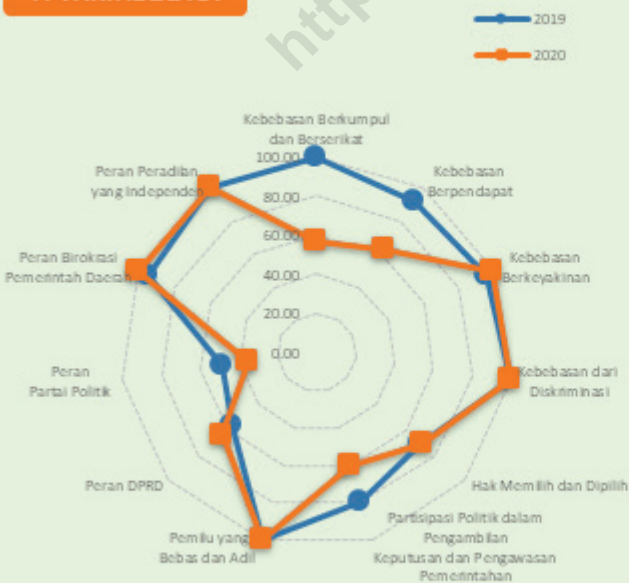
Perkembangan IDI 2015-2020



3 ASPEK IDI



11 VARIABEL IDI



Indeks Variabel yang Meningkat

Indeks variabel yang mengalami peningkatan:

- Kebebasan Berkecukupan
- Hak Memilih dan Dipilih
- Peran DPRD
- Peran Birokrasi Pemerintah Daerah

Indeks Variabel yang Tetap

Indeks variabel yang tetap:

- Kebebasan dari Diskriminasi
- Pemilu yang Bebas dan Adil
- Peran Peradilan yang Independen

Indeks Variabel yang Menurun

Indeks variabel yang mengalami penurunan:

- Kebebasan Berkecukupan dan Berserikat
- Kebebasan Berpendapat
- Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan
- Peran Partai Politik





DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Jalan H. Masykur RT 19, Tanjung Selor 77212

Telepon: 0552-2033254

Homepage : kaltara.bps.go.id

Email: 6500@bps.go.id

ISBN 978-623-7914-73-0 (PDF)

